



| | | |
|-------------|------------------|--------------|
| Media Title | Bisnis Indonesia | |
| Date | 2 Oktober 2014 | Color |
| Section | News | Circulation |
| Page No | 29 | Article Size |
| Journalist | Anggara Fernando | Advalue |
| Frequency | Daily | PR Value |

► **TOL TRANS-SUMATRA**

Penetapan Skala Prioritas Proyek Dinilai Keliru

JAKARTA—Penetapan skala prioritas dalam pengerjaan proyek jalan tol Trans-Sumatra oleh pemerintah dinilai keliru karena pemerintah luput menghubungkan antarkota yang dekat dengan akses pelabuhan lebih dahulu baik dari sisi barat maupun timur.

Danang Parikesit, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menyatakan pemerintah perlu mengkaji ruas penugasan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 100/2014 tentang Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra.

"Kalau kita mau memperbaikinya, [pembangunan] *feeder* harus disiapkan dahulu daripada jalan utamanya. Kalau kita mengarah ke konsep laut sekarang, ruas jalan ke pelabuhan harus dikebut dan menjadi [prioritas] paling pokok," katanya kepada *Bisnis*, (1/10).

Jalan tol Trans-Sumatra adalah salah satu megaprojek infrastruktur

yang ingin diwujudkan pemerintah dengan menghubungkan jalan dari Banda Aceh ke Bandar Lampung. Selanjutnya, jalan ini akan terhubung dengan jalan tol Trans-Jawa melalui Jembatan Selat Sunda ataupun penyeberangan *roll on roll off* dari Merak-Bakauheni.

Jalan tol Trans-Sumatra ditargetkan menjadi tulang punggung ekonomi Sumatra-Jawa yang mencakup 80% kegiatan ekonomi secara nasional.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, ujar Danang, yang dibutuhkan dari jalan tol Trans-Sumatra adalah menciptakan keterhubungan antarkawasan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dia mendorong agar pemerintahan baru mengubah konsep pencapaian para birokrat yang tak hanya mengedepankan keberhasilan membangun jaringan transportasi, tetapi juga memperkuat konektivitas.

Menurutnya, dengan mengubah orientasi pembangunan dari darat ke

laut maka sektor transportasi darat otomatis akan terbangun sekaligus. Namun, jika pembangunan difokuskan pada sektor darat, konektivitas laut akan sulit terwujud.

Bila pembangunan sektor transportasi laut tak dikerjakan, hal ini akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi karena membeludaknya frekuensi arus barang di darat yang memicu kemacetan serta inefisiensi BBM. "Di atas 300 km, moda [angkutan] truk sudah tidak efektif," katanya.

Sebelumnya Djoko Murjanto, Direktur Jenderal Bina Marga menyatakan tol Trans-Sumatra akan dicanangkan sebelum kabinet Indonesia Bersatu II berakhir pada 20 Oktober.

Dia menjelaskan proses *launching* jalan tol ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah untuk memastikan kepada masyarakat dan para investor bahwa proyek Trans-Sumatra dipastikan akan berjalan. (Anggara Fernando/Fitri Sartina Dewi)